



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 019/302009
HARI : JUMAT
TANGGAL : 30 JANUARI 2009

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
1.	Krisis Ekonomi, Pemimpin Dunia Salahkan AS	3
2.	North Korea declares past accords with South 'dead'	3
3.	Iran Siap Bekerja Sama dengan AS	4
4.	Obama Angkat Saham Asia	5
II.	NASIONAL	
A.	POLITIK	
1.	Departemen Luar Negeri Belum Koordinasikan Pemulangan Hambali	6
2.	Presiden Melantik 15 Duta Besar Indonesia	6
3.	RI embassy in Manila repatriates 72 Indonesian crew members	6
4.	BNP2TKI Ingin Tangani Seluruh TKI	7
B.	EKONOMI	
1.	Obligasi Internasional Indonesia Ditanggapi Positif Pihak Asing	7
2.	Kurangi Tuduhan Internasional: Tingkatkan Produktivitas Sawit Rakyat	8
3.	Permintaan TKI Turun: Target Remitansi 2009 Akan Terkoreksi	8
4.	Depperin Minta FTA Ditunda	9
C.	SOSBUD	
1.	33 Perguruan Tinggi RI Masuk 5.000 Terbaik Dunia	10
2.	Women still face discrimination: Minister	10
3.	Saudi Buka Tiga Cabang Baru LIPIA	11
4.	RI-Malaysia Perkuat Jaringan Pariwisata	12

	D.	HANKAM	--
	E.	HUKUM	
	1.	Pembahasan RUU Rahasia Negara Dikhawatirkan Tergesa-gesa	12
	F.	OLAHRAGA	--
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
	1.	Energi Panas Bumi Bebaskan Indonesia dari Kemiskinan	13
	2.	Disaster response still fragile in RI: Humanitarian report	14
III.		ARTIKEL	
	1.	Opportunity not to be missed (by Obama Anak Agung Banyu Perwita and Bantarto Bandoro)	15
IV.		LAIN-LAIN	--
V.		EDITORIAL	
	1.	Rudal dan Soal Timur-Barat	16

Jakarta, 30 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. Krisis Ekonomi, Pemimpin Dunia Salahkan AS

Para pemimpin dunia senada menyalahkan kebijakan ekonomi AS yang hanya mengejar keuntungan tanpa melakukan pengawasan yang ketat, hingga mengakibatkan hancurnya perekonomian dunia.

Sinisme tersebut secara tersirat terlontar dari pidato para pemimpin dunia yang menghadiri Forum Ekonomi Dunia (WEC) di Davos, kemarin.

PM China Wen Jiabao menganalogikan AS sebagai sebuah predator yang berupaya untuk menguasai berbagai sisi dunia, baik dari sisi ekonomi dan politik.

"Tidak heran kalau ekonomi dunia jadi kacau, karena AS hanya mengejar keuntungan tanpa melakukan pengawasan yang super ketat dari industri moneter yang telah menggurita di seluruh dunia. Jelas, kalau sebuah usaha keuangan besar di negara itu yang hancur, maka hancur pula perekonomian di negara lain," kata Wen seperti dikutip AP, kemarin.

Namun, lanjut dia, AS masih merupakan mitra ekonomi dan dagang yang penting bagi China dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian domestik.

Hal senada dikemukakan oleh PM Rusia, Vladimir Putin yang menyatakan bahwa kolapsnya perekonomian domestik AS, telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi dunia. "Pengaruhnya terasa hingga ke seluruh pelosok dunia, terutama negara-negara yang memiliki hubungan langsung dengan AS," kata Putin.

Putin menyebut krisis saat ini adalah sebuah pukulan telak yang mendatangkan kehancuran di tiap sudut ekonomi global.

Tahun lalu, lanjut Putin, saat dirinya masih sebagai presiden, delegasi AS dengan tegas mengatakan bahwa perekonomian dalam kondisi yang stabil dan terus meningkat.

"Sekarang bisa dilihat, bagaimana rapuhnya kondisi perekonomian negara tersebut. Bank investasi yang dimiliki hancur berantakan," kata Putin.

Mengenai pertumbuhan ekonomi domestik, Wen optimis China akan mencapai target pertumbuhan yang terbesar di dunia, meski krisis menghantam dunia. "Saya mengatakan dalam forum ini bahwa pertumbuhan di China tidak akan kurang dari delapan persen," tegasnya.

Wen mengaku bahwa pertumbuhan delapan persen ekonomi- tingkat yang diperlukan bagi China untuk menghindari pengangguran dan gejolak sosial, adalah sesuatu yang sulit dicapai. Namun dengan pertumbuhan di China yang mantap dan berkembang cepat, maka delapan persen pertumbuhan ekonomi akan diraih.

Namun demikian, tingkat pertumbuhan tersebut akan membuat China harus berhemat, di mana pertumbuhan ekonomi China 2008 sebesar sembilan persen- tingkat rendah dalam tujuh tahun terakhir. Sebelumnya, angka pertumbuhan ekonomi China selalu terdiri atas dua digit. Namun, Wen tetap optimis.

"Akankah ekonomi China akan terus tumbuh cepat dan mantap? Beberapa orang meragukannya," kata Wen. "Tapi, saya bisa memberi Anda jawaban pasti: Ya, itu akan terjadi. Kami sangat percaya diri."

Forum Ekonomi Dunia adalah pertemuan tahunan politikus negara-negara, pebisnis, cendekiawan, dan wartawan. Forum yang dibentuk di Jenewa ini secara rutin melangsungkan pertemuan di Davos untuk membahas berbagai isu penting yang dihadapi dunia, seperti ekonomi, lingkungan, atau kesehatan. (Suara Karya)

2. North Korea declares past accords with South 'dead'

North Korea declared all military and political agreements with South Korea "dead" Friday, toughening its stance while accusing Seoul of pushing the peninsula to the brink of war.

The North's Committee for the Peaceful Reunification of Korea said Pyongyang was forced to nullify past peacekeeping accords between the two wartime rivals because of South Korean President Lee Myung-bak's hard-line stance against the North.

"The group of traitors has already reduced all the agreements reached between the north and the south in the past to dead documents," the committee in charge of inter-Korean affairs said in a statement carried by the state-run Korean Central News Agency.

The North warned that Seoul's continued hard-line stance would only draw "a heavier blow and shameful destruction" on the South.

In Seoul, Unification Ministry spokesman Kim Ho-nyeon said the government would issue a response later Friday.

The two Koreas technically remain at war because their brutal, three-year conflict ended in a truce, not a peace treaty, in 1953. The peninsula remains divided by a heavily fortified Demilitarized Zone, with thousands of troops stationed on both sides of the border.

Ties have warmed significantly over the past decade, with North Korean leader Kim Jong Il meeting with then-South Korean President Kim Dae-jung in a historic summit in 2000. The detente helped pave the way for first inter-Korean exchanges in 50 years.

But tensions have been high since Lee took office in Seoul nearly a year ago pledging to get tough with Pyongyang. He questioned the wisdom of his predecessors' "sunshine policy" of nurturing reconciliation by handing over aid to the nuclear-armed North unconditionally.

Pyongyang responded by cutting off all reconciliation talks with Seoul, suspending key joint projects and ratcheting up the rhetoric against a man the denounce as a "traitor" to Korean reunification.

"Never to be condoned are the crimes the Lee group has committed against the nation and reunification by bedeviling overnight the inter-Korean relations that had favorably developed amidst the support and encouragement of all the Koreans and ruthlessly crapping the inter-Korean agreements," the North said Friday.

Earlier this month, the North's military accused the South of preparing to wage war and said it was prepared to respond to any southern aggression.

Seoul has denied plotting any attack on the North.

On Friday, the North declared all agreements on the Koreas' disputed western maritime border "nullified," raising the specter of a naval skirmish. Disputes over the border prompted two deadly clashes in 1999 and 2002.

The U.S.-led United Nations Command unilaterally drew the Yellow Sea border at the end of the war - but Pyongyang claims it should be redrawn farther south. (The Jakarta Post)

3. Iran Siap Bekerja Sama dengan AS

Iran siap bekerja sama dengan Presiden Barack Obama jika AS mengubah praktik dan kebijakannya di kawasan itu, kata Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki, Kamis.

"Kami sangat yakin bahwa jika pemerintah baru AS, seperti yang dikatakan Tuan Obama, akan mengubah kebijakannya, tidak hanya dalam pernyataan namun dalam praktik, maka secara pasti mereka akan menemukan kawasan itu dalam pendekatan dan reaksi kooperatif," kata Mottaki, seperti dilansir Reuters.

"Dan Iran tidak terkecualikan dari pemahaman umum ini di kawasan kami," katanya pada sebuah panel menjelang Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swis.

Sementara itu, kepala badan pengawas nuklir PBB hari Kamis menyambut baik tawaran Obama kepada Iran dan mengatakan, dialog langsung merupakan satu-satunya cara untuk mengakhiri perselisihan nuklir yang telah berlangsung lama.

Hubungan AS-Iran dibekukan di bawah pemerintah Presiden George W. Bush. Namun, sebuah surat kabar Inggris melaporkan Kamis bahwa Washington sedang merancang surat kepada Iran untuk membuka jalan bagi perundingan langsung.

"Begitulah caranya. Itu seharusnya telah lama dilakukan," kata ketua Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Mohamed El Baradei dalam pernyataannya di Davos.

AS dan sejumlah negara Barat menuduh Iran mengembangkan program nuklir untuk membuat senjata. Teheran membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa program nuklirnya hanya untuk kepentingan sipil. (ANTARA)

4. Obama Angkat Saham Asia

Bursa saham di Asia menguat, Kamis (29/1), setelah DPR AS menyetujui paket stimulus sebesar 825 miliar dollar AS. Indeks saham di Hongkong naik 4,6 persen. Investor berharap stimulus itu akan membantu perekonomian AS.

Adapun bursa Eropa dibuka lebih rendah. Indeks Nikkei 225 naik 1,8 persen, bahkan ketika data mengenai penjualan ritel di perekonomian kedua terbesar di dunia itu melemah dalam empat tahun terakhir. Sementara indeks saham di China tutup sepanjang pekan ini. Indeks Kospi, Korea Selatan, naik 0,7 persen dan indeks Australia naik 0,9 persen.

Sentimen positif di Asia itu terkait dengan persetujuan DPR AS atas paket stimulus yang diajukan Presiden Barack Obama. Persetujuan ini menandakan stimulus tersebut sudah semakin dekat dengan kenyataan.

DPR AS yang dikuasai Partai Demokrat memberi persetujuan pada Rabu malam waktu Washington. Setelah disetujui DPR, rancangan itu masih akan dibahas oleh Senat AS, Senin pekan depan. Para pemimpin Demokrat bertekad rancangan undang-undang ini dapat ditandatangani pada pertengahan Februari mendatang. "Paket stimulus AS memiliki dampak psikologis positif pada pasar global," ujar Castor Pang, analis pada Sun Hung Kai Financial di Hongkong.

Paket stimulus antara lain berupa suntikan modal ke lembaga keuangan dan pencaangan proyek-proyek pemerintah. Namun, masih ada berita buruk, yaitu seputar perkiraan keuntungan korporasi global dan pengangguran. Tingkat pengangguran akan terus meningkat dan membuat konsumen AS kehilangan selera untuk berbelanja.

Presiden Obama yang menduduki jabatannya delapan hari lalu membukukan kemenangan pertamanya dengan meloloskan paket stimulus senilai 825 miliar dollar AS dengan hasil pemungutan suara 244-188 di DPR.

Setiap anggota Partai Republik yang menolak rancangan stimulus itu mengeluh tentang terlalu banyaknya pengeluaran pemerintah dan pengurangan pungutan pajak dirasakan belum cukup. Semua anggota DPR dari Demokrat mendukung Obama karena stimulus tersebut akan mengatasi krisis ekonomi yang tengah melanda AS.

"Saya berharap kita semua dapat terus menguatkan rencana ini sebelum sampai di meja saya untuk disahkan menjadi undang-undang. Akan tetapi, kita tidak akan membiarkan beberapa anggota yang berlawanan pendapat menghalangi langkah kita," kata Presiden Obama.

Terus melemah

Dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan Gedung Putih, Obama menambahkan, stimulus itu harus berjalan lancar. Dia juga menekankan bahwa warga AS harus segera memiliki pekerjaan lagi. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah menciptakan lapangan pekerjaan.

Adapun perdagangan saham yang tengah berjalan di Eropa mengalami penurunan. Indeks CAC-40 Perancis turun 1,1 persen, DAX Jerman turun 1 persen, dan FTSE 100 Inggris turun 1,1 persen. Sudah tiga hari berturut-turut indeks harga saham Eropa turun karena penurunan harga saham pada sektor perbankan dan komoditas.

"Lolosnya paket itu dari DPR merupakan pertanda baik, tetapi stimulus itu sendiri tidak menyelesaikan apa-apa," tutur Justin Urquhart Stewart, direktur pada Seven Investment Management.

Di pasar uang, kurs dollar AS dan yen menguat terhadap euro. Hal tersebut mencerminkan ketakutan yang mendalam walaupun sudah ada paket penyelamatan yang dicanangkan oleh Presiden Obama. Kurs euro turun 0,7 persen menjadi 1,3041 dollar AS. Yen menguat terhadap euro 1 persen menjadi 177,4 yen per satu euro. Adapun dollar AS melemah 0,4 persen terhadap yen menjadi 90,03 yen per dollar AS.

"Para investor lebih berhati-hati. Hal ini menguntungkan kurs dollar AS dan yen yang menjadi alternatif investasi paling aman," kata Christian Lawrence, analis mata uang yang bekerja pada RBC Capital Market di London. (Koran Kompas)

II. NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Departemen Luar Negeri Belum Koordinasikan Pemulangan Hambali

Departemen Luar Negeri belum menerima permohonan bantuan dari Markas Besar Kepolisian RI untuk memulangkan Hambali ke Indonesia. "Permintaan itu belum ada," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada Tempo, Kamis (29/01).

Faiza mengaku mendengar dari media bahwa Polri akan menjajaki kemungkinan pemulangan Hambali atau akses terhadapnya. Namun dia menegaskan sampai saat ini belum mendengar adanya permintaan bantuan atau koordinasi untuk itu.

Posisi pemerintah terkait penutupan penjara Guantanamo, katanya, masih sama dengan minggu lalu. "Kita masih wait and see," ujarnya. Alasannya, pemerintah Amerika Serikat secara internal masih membicarakan teknis penanganan para narapidana di penjara itu.

Menurut Faiza pemerintah telah menanyakan kepada pemerintah AS tentang hal itu. AS menyatakan bahwa napi akan dikategorikan menjadi dua, kategori berat dan combatan. Napi berat akan diproses secara hukum sipil dan combatan akan diproses di pengadilan militer. Semua proses itu dilakukan di dalam negeri AS. (Tempo Interaktif)

2. Presiden Melantik 15 Duta Besar Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik 15 Duta Besar Republik Indonesia (RI) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Istana Negara RI, Jumat (30/1).

Mereka adalah Ahmad Rusdi sebagai Duta Besar RI di Yunani, Dian Triansyah Djani sebagai perutusan tetap RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa, WTO, dan organisasi internasional lainnya yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Eddy Pratomo sebagai duta besar RI untuk Republik Federal Jerman.

Eddy Setiabudhi sebagai Duta Besar RI untuk Republik Demokratik Timor Leste, Harsha Edwana Joesoef sebagai Duta Besar RI untuk Slovakia. Yudhistiranto Sungadi sebagai duta besar RI untuk Tanzania. I Gede Ngurah Swajaya sebagai duta besar RI di Kamboja.

Ishak Latuconsina sebagai duta besar di Pakistan, Mohammad Oemar sebagai duta besar RI di Italia, merangkap Malta, Cyprus, FAO, IFAD, dan WFP, Muhammad Ibnu Said sebagai Duta Besar RI di Tunisia, Nicholas Tandi Dammen sebagai Duta Besar untuk Korea Selatan, Nining Suningsih Rochadiat sebagai Duta Besar RI di Ukraina merangkap Georgia.

Primo Alui Joelianto sebagai Duta Besar RI di Australia, Zainulbahar Noor sebagai Duta Besar RI di Jordania, merangkap Palestina, Zet Mirzal Zainuddin sebagai Duta Besar RI di Bangladesh merangkap Nepal. (KONTAN)

3. RI embassy in Manila repatriates 72 Indonesian crew members

The Indonesian embassy in Manila has again helped repatriate Indonesian ship crew members, this time 72 of them.

According to the foreign ministry in Jakarta on Thursday, they are repatriated in two groups, with the first group of 36 already arrived back in Indonesia last week.

They were working as crew members of Taiwanese fishing boats in international waters near Taiwan and China. When they arrived in Manila, they complained about their wages which they have not received.

The Indonesian embassy had already reported the case to the relevant authorities in Jakarta, and thanks to insistence from the Indonesian embassy the fishing companies provided the Indonesian ship crew members with some pocket money 20 US dollars each. The 36 crew members flew home by Cebu Pacific airlines.

The second group of 36 crew members are those who had been abandoned by their South Korean employers.

After being facilitated by the Indonesian embassy, their employers eventually gave them their wages in full, including the cost of their repatriation. (ANTARA)

4. BNP2TKI Ingin Tangani Seluruh TKI

BADAN Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tak terima jika hanya diberi kewenangan menggarap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di dua negara, yakni Korea Selatan dan Jepang. Kepala BNP2TKI M. Jumhur Hidayat menilai pembatasan tersebut akan memangkas kewenangan lembaga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans), BNP2TKI hanya berwenang mengurus TKI berdasarkan kerja sama antarpemerintah (G to G). Saat ini Indonesia hanya memiliki perjanjian G to G dengan kedua negara tersebut.

"Jika hanya mengurus TKI G to G saja, fungsi badan jadi mubazir. TKI G to G hanya diurus oleh satu direktorat dalam BNP2TKI," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX di Jakarta, kemarin.

Menurut Jumhur, BNP2TKI berwenang untuk mengurus seluruh penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri sesuai amanat Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Adapun kewenangan tersebut tak bisa dibatasi oleh jenis program tertentu.

"Lagipula jumlah TKI yang berada dalam program G to G sangat sedikit. Tidak sampai satu persen dari jumlah TKI yang ada," kata dia. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Asiah Salekan berpendapat untuk menyelesaikan perselisihan itu, dewan segera mengagendakan rapat gabungan antara BNP2TKI dengan Departemen Tenaga Kerja.

Diharapkan, setelah keduanya bertemu dalam rapat Rabu depan, akan ada solusi. "Kalau pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan, kita bawa saja ke jalur hukum. Solusi terakhirnya, bisa kita bawa ke Mahkamah Agung," kata Asiah.

Menurut anggota komisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sonny Soemarsono, mengatakan bahwa perbedaan dalam membaca UU No 39/2004 baiknya diselesaikan lewat jalur hukum. Ia juga mendesak agar keputusan segera diambil agar tidak berlarut-larut. "Karena konflik yang berkepanjangan akan merugikan masyarakat," tegas Sonny. (Jurnal Nasional)

B. EKONOMI :

1. Obligasi Internasional Indonesia Ditanggapi Positif Pihak Asing

Pemerintah menetapkan target indikatif penjualan global bond (biasa disebut juga dengan obligasi internasional) jangka pendek atau medium treasury notes 2009 sebesar US\$ 4 miliar atau Rp 44 triliun.

"Dalam program global medium treasury notes memang disebutkan target indikatif maksimum US\$ 4 miliar karena aturannya begitu harus disebutkan maksimumnya," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto kepada wartawan di kantornya, Kamis (29/1).

Target tersebut, ujar Rahmat, mengacu pada jumlah global bond tahun lalu dan tidak harus dipenuhi besaran target tersebut. "Sebenarnya dengan adanya standby loan dan Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) maka target tersebut hanya indikatif saja tidak harus dipenuhi target sebesar itu karena juga sangat tergantung pada kondisi pasar," ucap Rahmat.

Namun, persepsi investor asing cukup positif terhadap obligasi negara Indonesia karena dari rating sovereign credit Indonesia yang cenderung tetap dan tidak berubah meskipun terjadi krisis global yang semakin memburuk. "Banyak negara dan korporasi yang diturunkan ratingnya tapi Indonesia tetap solid," kata Rahmat.

Bahkan, menurut dia, Fitch Ratings (lembaga prestisius pemeringkat kredit internasional) menyebutkan kebijakan fiskal dan pengelolaan utang atau public finance management yang prudent (bijaksana) merupakan salah satu faktor kunci tidak terganggunya fundamental ekonomi Indonesia meskipun di tengah badai krisis global. (Tempo Interaktif)

2. Kurangi Tuduhan Internasional: Tingkatkan Produktivitas Sawit Rakyat

Peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat dengan penanaman kembali (replanting) dan menggunakan benih unggul, sangat penting.

Dengan demikian, perusahaan kelapa sawit tidak perlu melakukan ekspansi sehingga tuduhan internasional terhadap industri kelapa sawit Indonesia dapat ditekan.

Demikian ditegaskan Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Soedjai Kartasasmita, pada acara launching pameran dan konferensi kelapa sawit dunia (Internasional Conference and Exhibition on Palm

Oil (ICE-PO 2009)) yang akan diselenggarakan pada Mei 2009, Rabu (28/1). "Jika produktivitas tinggi tanpa ada ekspansi pun Indonesia tetap jadi produsen tertinggi di dunia," tandasnya.

Soedjai mencatat, seluas 2,6 juta hektare kebun sawit dari total area sekitar 6,4 juta hektare adalah milik rakyat dengan produktivitas hanya 2-2,5 ton per hektare. Dengan penggunaan benih unggul, lanjutnya, produktivitas bisa mencapai 4 ton per hektare.

"Pusat penelitian kelapa sawit (PPKS) sedang menghasilkan benih sawit dengan produktivitas mencapai 6 ton per hektare, bahkan di Kalimantan Timur ada yang telah mencapai 7,1 ton per hektare," jelasnya.

Ketua Pelaksana Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Derom Bangun mengatakan bahwa potensi produktivitas CPO Indonesia bisa mencapai 5-7 ton per hektare. Saat ini, lanjutnya, masih 3,5 ton per hektare.

Derom menargetkan, produksi CPO pada tahun 2009 mencapai 20 juta ton. Kebutuhan dalam negeri 4,5-5 juta ton dan diekspor 15,5 juta ton. Namun, tegasnya, apabila untuk biodiesel dapat diserap 1,5 juta ton, ekspor dapat diturunkan sehingga tekanan dari pasar dunia yang menekan harga CPO Indonesia dapat berkurang.

Kepala Urusan Kerja Sama Penelitian PPKS Yohanes Samosir kepada SH mengatakan, sejalan dengan perbaikan harga CPO saat ini, PPKS akan merevisi target produksi bibit sawit menjadi lebih dari 35 juta pada 2009. Tahun lalu, jelasnya, produksi mencapai lebih dari 51 juta dengan kapasitas 50-55 juta bibit.

Hambat Ekspor

Uni Eropa akan menjadikan Carbon Foot Prints (jejak karbon) dan high conservation value (HCV) menjadi isu sentral dalam pengembangan industri kelapa sawit. Isu ini bisa menghambat ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

Wakil Ketua I Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun, Rabu, mengatakan isu ini sudah menjadi pembahasan dalam sejumlah pertemuan sawit dunia sebab isu kerusakan lingkungan sering dikaitkan dengan perkebunan kelapa sawit. "Pembukaan lahan sawit, terutama di lahan gambut dianggap menjadi penyumbang efek rumah kaca yang sangat besar," kata Derom.

Lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar yang menyerap gas CO₂. Pembukaan lahan maupun replanting menyebabkan terlepasnya sejumlah besar simpanan karbon ke udara.

Terkait HCV, dikatakan akan terus menjadi isu penting dalam setiap pembukaan lahan karena mengganggu satwa langka, seperti gajah. (Sinar Harapan)

3. Permintaan TKI Turun: Target Remitansi 2009 Akan Terkoreksi

Penerimaan devisa negara dari TKI (remitansi) terancam menurun drastis karena adanya penurunan permintaan tenaga kerja, terutama di sektor formal. Berdasarkan data Depnakertrans, target penempatan tenaga kerja migran Indonesia mencapai satu juta orang dengan target remitansi sebesar US\$ 4,3 miliar.

Sebelumnya, ILO juga melansir data pekerja migran Indonesia berpotensi mengirimkan remitansi lebih dari US\$ 6,1 miliar setiap tahunnya yang bersumber lebih dari 700.000 pekerja migran yang terdokumentasi pergi ke luar negeri.

Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Depnakertrans I Gusti Made Arke mengungkapkan bahwa krisis global berimbas signifikan pada tertutupnya peluang tenaga kerja di sektor formal sehingga berpotensi mengurangi jumlah remitansi di tahun 2009. "Melihat kondisi saat ini, target tersebut sangat mungkin terkoreksi," katanya, saat ditemui SH, Rabu (28/1).

Mulai Desember 2008 hingga Maret 2009, rekrutmen CTKI ke Jepang yang mulai ditiadakan. Peralihannya, Pemerintah Jepang meminta perubahan lokasi pelatihan menjadi di Jakarta.

BNP2TKI melansir permintaan kuota pengguna jasa di Jepang sebanyak 1.000 TKI diharapkan dapat terpenuhi pada 2008-2009. "Tahun ini kita targetkan mencapai 792 TKI untuk penuhi kuota karena tahun lalu kita baru berhasil rekrut 208 TKI," ungkap Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat.

Soal pemindahan pelatihan ke Indonesia, lanjutnya, memang sudah ada pembicaraan informal, di mana empat bulan dilatih di Indonesia dan dua bulan di Jepang. (Sinar Harapan)

4. Depperin Minta FTA Ditunda

Depperin meminta perdagangan bebas dengan Australia dan Selandia Baru ditunda. Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian (Depperin) Dedy Mulyadi mengatakan,

penundaan kesepakatan perdagangan bebas (Free Trade Agreement/ FTA) penting untuk melindungi industri dalam negeri.

Industri lokal belum mampu bersaing, bahkan untuk merebut pasar domestik. Rencananya, FTA ASEAN-Australia dan ASEAN-Selandia Baru akan ditandatangani pada Maret atau April 2009. "Dalam kondisi krisis, setiap negara cenderung memperkuat produksi nasional masing-masing," jelas dia di Jakarta kemarin.

Menurut Dedy, penundaan dilakukan dalam satu atau dua tahun ke depan. Dampak langsung kerja sama FTA, jelas dia, antarlain adalah penurunan tarif bea masuk komoditas atau produk yang telah disepakati. Padahal, langkah itu bisa mengurangi daya saing produk dalam negeri. "Pemerintah harus pro ke industri nasional.

Dalam kondisi krisis. Kalau BM diturunkan dikhawatirkan produk lokal akan kalah bersaing. Ini yang mestidicermati," paparnya. Dia mengakui kesepakatan FTA berada di bawah wewenang Departemen Perdagangan (Depdag). Namun, Depperin meminta Depdag memperhitungkan kondisi krisis global, di mana seluruh ekspor nasional diprediksi melambat, termasuk sektor manufaktur.

"Dalam rapatrapat koordinasi, Depperin mengusulkan hal itu. Saya, secara pribadi, juga minta jangan dulu," tuturnya. Menurut dia, di saat krisis finansial melanda, seluruh negara di dunia cenderung mengambil langkah melindungi produksi nasionalnya masing-masing. Karena itu, tegas dia, Indonesia juga perlu melakukan hal serupa.

"Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani) juga berpandangan seperti itu," ujarnya. Dikonfirmasi mengenai koordinasi kemungkinan penundaan tersebut dengan Depdag, Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Depdag Gusmardi Bustami secara terpisah mengatakan rencana penundaan itu belum pernah dibicarakan.

"Saya belum pernah dengar," ujarnya. Menurut dia, dalam kerangka FTA bilateral, Indonesia saat ini sedang membahas kerja sama perdagangan bebas dengan Australia dan Indonesia dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (The European Free Trade Association/EFTA).

Sementara dalam kerangka regional, Indonesia masuk dalam pembahasan FTA ASEAN-Selandia Baru-Australia dan ASEAN-India. "FTA ASEAN akan diteken Februari mendatang dalam acara ASEAN Summit," jelasnya.

Menanggapi permintaan Depperin tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berpendapat bahwa pemerintah memang perlu berhati-hati dalam melakukan perjanjian kerja sama, terlebih dalam situasi krisis keuangan global saat ini.

Dalam hal ini, jelas dia, Indonesia harus memperoleh kejelasan apa keuntungan yang akan diperoleh dari kerja sama tersebut. Dia menambahkan, pemerintah juga harus mendahulukan kepentingan industri dalam negeri terkait kondisi tersebut. "Jangan asal tekenlah, tidak perlu buru-buru, dan harus ekstrasahati-hati, apalagi dalam kondisi krisis seperti ini," tegas Sofjan.

Terlepas dari itu, Sofjan menilai putusan Indonesia untuk menyepakati kedua FTA ini belum akan terealisasi dalam waktu dekat. Sebab, biasanya pengusaha akan dilibatkan melalui Apindo untuk menilai keuntungan dan kekurangan dari kerja sama tersebut. "Saya rasa tidak akan dalam waktu dekat (putusannya), kitabiasanya dilibatkandalam hal ini, tapi belum," tuturnya. (Koran Sindo)

C. SOSBUD

:

1. 33 Perguruan Tinggi RI Masuk 5.000 Terbaik Dunia

Sebanyak 33 perguruan tinggi negeri dan swasta Indonesia masuk kelompok 5.000 PT terbaik dunia berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan Webometrics yang berkantor pusat di Madrid, Spanyol.

Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dikeluarkan Januari 2009 pada situs www.webometrics.info kemarin, tiga perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka menempati posisi teratas untuk lingkup Indonesia, yakni UGM, ITB, dan Universitas Indonesia (UI). UGM berada di posisi ke-623 disusul ITB di urutan 676, kemudian UI di posisi 906.

Perguruan tinggi swasta (PTS) Universitas Gunadarma Jakarta berada di posisi ke-4 secara nasional dengan peringkat Webometrics di urutan 1.604. Capaian Gunadarma ini cukup mengejutkan karena posisinya jauh melampaui capaian PTN terkemuka seperti IPB yang berada di urutan 2.063, ITS (1.762), Universitas Brawijaya (2.152), dan Universitas Airlangga (2.672), yang selama ini dianggap sebagai PT papan atas.

Sementara itu, 50 perguruan tinggi terbaik dunia versi Webometrics diborong PT Amerika Serikat (AS). Bahkan mulai peringkat 1–23 ditempati PT terkemuka negara yang dipimpin Barack Obama itu. Massachusetts Institute of Technology (MIT) berada di posisi 1, disusul Stanford University (2), Harvard University (3).

Di bawahnya University of California Berkeley Cornell University, University of Michigan, California Institute of Technology, dan PT terkemuka di AS lainnya. Kepala Humas Universitas Negeri Semarang (Unnes) Nugroho Trisnu Brata mengatakan, Unnes pada 2009 masuk peringkat ke-4.800 berdasarkan pemeringkatan Webometrics.

"Hasil ini jauh lebih baik karena pada tahun-tahun sebelumnya Unnes tidak masuk 5.000 PT terbaik versi Webometrics," paparnya di Semarang kemarin. Direktur Institute for Education Reform (IER) Universitas Paramadina Utomo Dananjaya mengatakan peringkat perguruan tinggi Indonesia termasuk rendah jika dibanding negara-negara tetangga seperti Singapura, Hong Kong, India, dan China.

"Kita masih kalah jauh dibanding mereka. Perguruan tinggi kita belum mampu bersaing," ujarnya ketika dihubungi SINDO tadimalam. Menurut Utomo, hal ini akibat ketidakpedulian pemerintah terhadap pendidikan tinggi. Terlebih dengan disahkannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang memperlihatkan pelepasan tanggung jawab pemerintah untuk membiayai perguruan tinggi.

"Saya pikir untuk tahun-tahun mendatang peringkat perguruan tinggi kita akan semakin merosot ke level rendah," katanya. Dalam UU BHP, lanjut Utomo, perguruan tinggi malah diberikan keleluasaan untuk mencari modal. Sementara pemerintah diberikan porsi yang lebih ringan dalam pembiayaan pendidikan tinggi.

Utomo berharap pemerintah yang memiliki anggaran besar dapat lebih bijaksana dan mau berkorban membiayai pendidikan tinggi. "Mengembangkan ilmu dan pendidikan memang butuh biaya besar. Siapa lagi yang memiliki uang kalau bukan pemerintah," tandasnya. (Koran Sindo)

2. Women still face discrimination: Minister

Although Indonesia has since 1984 adopted the UN convention on the elimination of discrimination against women (CEDAW), many women in the country still face violence and discrimination, a high-level meeting on the convention concluded here Thursday.

Addressing the meeting, State Minister for Women's Empowerment Meutia Hatta said the abuses had been allowed to go on because of laws that encouraged discrimination and violence against women.

"We still have 16 national laws that do not support women's rights, on top of many regional bylaws that also allow for discrimination. No wonder we have problems of violence and discrimination," she said.

Meutia added many women in certain areas still faced problems over dressing and attitude.

"Some of the problems are because the review of Marriage Law No. 1/1974 is still not implemented and because of the strong patriarchal system in Indonesia," she said.

In more remote areas, she went on, people ignored national laws and adopted customary laws that provided far more benefits to men than women.

In inheritance cases, Meutia said, women often wound up with little.

Another problem was that courts handed down light sentences for perpetrators of violence against women.

"In 2005, the National Commission on Violence against Women [Komnas Perempuan] found that these perpetrators received light sentences," Meutia said.

More than 20,391 cases of violence against women across 29 provinces were recorded by Komnas Perempuan in 2005, up from only 14,020 cases in 2004.

Also in 2005 the commission reported 1,165 women had fallen victim to trafficking and violence, while more than 1,120 women had been raped.

In spite of the problems, Meutia highlighted some success in implementing the CEDAW.

Jean D'Cunha, regional program director for the UN Development Fund for Women (UNIFEM) for East and Southeast Asia, lauded Indonesia's progress in eliminating discrimination against women, pointing to scores of amended laws to strengthen women's place in society.

"Indonesia should be proud of amendments in electoral laws and qanuns [bylaws] in Aceh," she said. (The Jakarta Post)

3. Saudi Buka Tiga Cabang Baru LIPIA

Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia melalui Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Sa'ud, dalam waktu dekat berencana membuka cabang baru Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di tiga daerah di Indonesia.

Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni, menjelaskan, bahwa ada tiga daerah yang akan berdiri cabang baru LIPIA. "Memang betul, LIPIA akan ada di Semarang, Jawa Tengah, di Makassar, Sulawesi Selatan, dan mungkin satu lagi di Padang, Sumatera Barat. Tapi ini masih menunggu waktu sampai kesiapan memadai," jelas Menag, usai menyaksikan wisuda mahasiswa LIPIA angkatan 27,28 dan 29 di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (29/1) siang.

Dikatakan, dalam waktu dekat, Pemerintah Daerah Sulsel akan segera mewujudkan pendirian LIPIA bagi masyarakat Sulawesi Selatan. "Insya Allah dalam waktu dekat, Sulsel akan dapat merealisasikan rencana berdirinya LIPIA, karena mereka sudah siap," tandas dia,

Menag menyambut gembira kehadiran LIPIA di Indonesia, terlebih adanya rencana penambahan cabang baru di tiga daerah di Indonesia. "Lembaga ini sangat dibutuhkan umat Islam Indonesia dewasa ini," ujarnya.

Dengan semakin banyaknya lulusan dari lembaga tersebut yang berjumlah lebih dari 1000 mahasiswa, imbuh Menag, maka Indonesia kini memiliki kader-kader yang cukup tangguh yang akan kembali ke kampung masing-masing untuk memberikan pelajaran agama dan bahasa Arab sebaik-baiknya.

"Sehingga, kebutuhan yang selama ini kita perlukan, sudah memadai," Menag menegaskan.

Menag mengharapkan, ke depan lebih banyak lagi kader-kader yang dihasilkan dari lembaga tersebut. Ia sangat setuju pembukaan cabang baru LIPIA di sejumlah daerah di Indonesia. "Kita tidak ingin memusatkan hanya di Jakarta. Untuk itu, kawasan Indonesia Timur juga akan mendapatkan porsi yang cukup baik," tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Sa'ud Prof Dr Sulaiman bin Abdullah bin Hamud Abalkhail, mengemukakan, penambahan ini semata-mata untuk memberikan kesempatan kepada pemuda Muslim Indonesia guna memperdalam ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab.

"Dengan dibukanya cabang baru LIPIA di tiga daerah di Indonesia, maka semakin banyak lagi kader-kader ulama Indonesia yang akan dihasilkan oleh LIPIA," tandasnya.

Lebih lanjut Dr Sulaiman menyatakan, hubungan Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia, sangat erat. Dan untuk lebih mempererat hubungan kedua negara, sejak 30 tahun yang lalu, telah berdiri LIPIA yang merupakan cabang dari Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Sa'ud di Riyadh, Saudi Arabia.

Hingga tahun 2008, tak kurang dari 8.600 mahasiswa telah menyelesaikan pendidikannya di lembaga yang menekankan pada pengajaran bahasa Arab dan pengetahuan tentang Islam. "Insya Allah, tahun ini akan diwisuda lebih dari 1.800 siswa," ungkap dia.

Adapun Direktur LIPIA Dr Abdullah Hadhidh Al-Sulamy mengungkapkan, dari 8.604 alumnus LIPIA selama ini, tersebar di berbagai kegiatan dan profesi. (Republika)

4. RI-Malaysia Perkuat Jaringan Pariwisata

INDONESIA dan Malaysia sepakat bekerja sama menerapkan strategi Asean untuk Asean, Indonesia untuk Asean, Malaysia untuk Indonesia dan juga sebaliknya, khusus di bidang pariwisata. Kedua negara sepakat lebih menguatkan pasar Asean sekaligus sebagai langkah antisipasi menghadapi krisis ekonomi global yang mulai terasa dampaknya pada 2009 ini.

"Jadi kita tidak bergantung dengan negara barat, cukup kita memperkuat jaringan kerja sama pariwisata dengan negeri tetangga salah satunya Malaysia," kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik usai menerima kunjungan Menteri Pelancongan Malaysia, Dato Sri Azalina Dato Othman, di Gedung Sapta Pesona Jakarta Kamis (29/1).

Pertemuan ini merupakan kelanjutan kerja sama pariwisata Indonesia Malaysia yang sudah ditandatangani pada tahun 1990. "Hal ini sekaligus implementasi dari pertemuan para menteri pariwisata se-ASEAN pada ASEAN Tourism Forum (ATF) di Hanoi, Vietnam awal Januari 2009 lalu," kata Menbudpar.

Sementara itu Dato Sri Azalina mengatakan Indonesia merupakan pasar terbesar wisatawan asing yang datang ke Malaysia. Sebanyak 2,4 juta warga Indonesia mendatangi Malaysia sepanjang tahun lalu. "Kita memang bersaing menarik wisatawan dunia, namun kita akan bekerja sama sehingga bisa meningkatkan saling berkunjung antarwisatawan kedua negara," kata Sri Azalina.

Menbudpar Jero Wacik mengatakan, sebagai tindak lanjutnya saat ini tengah

dijajaki kerja sama dalam inflight magazine dan video TV inflight di masing-masing maskapai penerbangan kedua negara (Garuda Indonesia dan Malaysian Airlines). Sedangkan di bidang MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) akan dibuat paket bersama untuk pre and post tour MICE ke dua negara.

"Salah satu contoh adalah akses penerbangan langsung Air Asia Bandung-Kualalumpur yang telah meningkatkan pengunjung, dan ini baru satu, jika dibuka lagi tentu akan bertambah jumlah wisatawannya," kata Jero Wacik.

Jero Wacik berharap penandatanganan kerja sama ini akan segera ditindaklanjuti. "Kita serahkan kedua sekjen bisa mempersiapkan ini semua, saya siap jika penandatanganan kerjasama ini di Malaysia, atau di Indonesia," tambahnya

Sebagai informasi pada tahun 2007 jumlah kunjungan wisman Malaysia ke Indonesia sebesar 891.300 orang, tahun 2008 diperkirakan mencapai 2 juta orang. Sedangkan wisatawan dari Indonesia yang berkunjung ke Malaysia tahun 2007 sebesar 1,8 juta dan tahun 2008 sebanyak 2,4 juta orang. (Jurnal Nasional)

D. HANKAM : Tidak Ada

E. HUKUM :

1. Pembahasan RUU Rahasia Negara Dikhawatirkan Tergesa-gesa

KESEPAKATAN pemerintah dan DPR menyelesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Rahasiaan Negara untuk disahkan Maret 2009 dikhawatirkan membuat proses pembahasan berjalan tergesa-gesa. Padahal penting bagi DPR punya waktu panjang menyosialisasikan terlebih dulu RUU itu, sekaligus mengakomodasi reaksi publik terhadap RUU tersebut.

"Jangan memaksakan pengesahan mengingat masih ada sejumlah persoalan substansial di dalamnya," kata Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makaarim dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (29/1). Dia meminta pemerintah tidak memanfaatkan momentum menjelang Pemilu 2009 untuk memaksakan pengesahan.

Pembahasan yang terburu-buru mengundang kecurigaan adanya motif-motif politik anti reformasi di instansi terkait RUU ini, seperti TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Motif-motif tersebut berhubungan dengan pembatasan akses publik terhadap sumber-sumber informasi strategis yang dibutuhkan untuk mendorong reformasi dan demokratisasi. Pengembalian kekuatan aktor keamanan membatasi kebebasan informasi publik sekaligus memberi ancaman pidana juga dikhawatirkan.

"Akan ada pula pembungkaman kelompok -kelompok kritis yang mengangkat isu-isu strategis penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dengan delik pembocoran rahasia negara," kata Mufti.

Ujung-ujungnya, tambah dia, rancangan yang tengah dibahas DPR dikhawatirkan berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak-hak sipil dan politik. Termasuk juga mengecualikan kebebasan informasi yang dijamin dalam UU Keterbukaan Informasi Publik

Sebelumnya, anggota Komisi I (bidang pertahanan) Yuddy Chrisnandi menyarankan pembahasan rancangan ditunda dan diserahkan kelanjutannya pada proses legislasi DPR periode berikutnya. Sekaligus memberi kesempatan dilaksanakannya UU Kebebasan Informasi Publik (KIP).

"Saat ini UU KIP masih mencari bentuknya. Sebaiknya UU yang baru disahkan itu jangan diadu dengan RUU Rahasia Negara," katanya. Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra mengatakan hal sebaliknya. Dia menegaskan, Rahasia Negara tidak akan mengebiri UU Kebebasan Informasi Publik.

"Obyeknya berbeda. Tidak mungkin tumpang tindih, apalagi menjegal," katanya. Obyek Rahasia Negara adalah informasi-informasi yang apabila diketahui pihak yang tidak berhak akan merugikan dan membahayakan negara. Atau setidaknya mengganggu penyelenggaraan kegiatan negara.

Dia mencontohkan, informasi di bidang intelijen, militer, diplomatik, maupun kebijakan ekonomi maupun moneter. Dia menambahkan, hampir semua negara punya undang-undang rahasia negara. "Jika semua informasi terbuka untuk publik, niscaya akan menyengsarakan kehidupan publik itu sendiri," katanya.

Dia berjanji akan jeli dan waspada dalam pembahasan agar tidak membuka peluang rezim berkuasa memberangus kebebasan informasi demi kepentingan dirinya. "Batasannya harus diperjelas," kata Yusron.

Tiga hari lalu, Departemen Pertahanan membahas Daftar Inventarisasi Masalah RUU Rahasia Negara bersama Komisi I dan sejumlah instansi terkait, seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Sandi Negara, serta BIN. (Jurnal Nasional)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. Energi Panas Bumi Bebaskan Indonesia dari Kemiskinan

Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, RS Trijana Kartoatmodjo menyatakan, Indonesia dapat bebas dari kemiskinan jika mampu memanfaatkan energi panas bumi sebagai pengganti minyak bumi.

"Lambat laun cadangan minyak bumi akan menipis dan suatu saat harganya kian tak terjangkau. Pencegahan hal itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan energi panas bumi," katanya di acara sosialisasi kegiatan industri hulu migas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, saat ini Indonesia memiliki energi panas bumi sebanyak 27 gigawatt (GW) dan baru terpasang sebanyak 1 gigawatt (GW). Selain itu, energi lain yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti minyak bumi antara lain energi hidro sebanyak 75,7 gigawatt yang baru terpasang sebesar 4 gigawatt.

"Selama ini, gas menjadi tulang punggung pendapatan nasional yang member kontribusi sebanyak 58 persen," ujarnya.

Sementara itu, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mencatat penerimaan negara dari kegiatan hulu migas di tahun 2008 meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Divisi Eksternal BP Migas, Amir Hamzah menambahkan, produksi rata-rata minyak tahun 2008 di Jatim 52 barel per hari, dari total nasional 976.600 barel/hari.

"Penerimaan negara tahun 2008, sekitar Rp203 triliun (angka sementara) dan 2007 mencapai Rp177 triliun," katanya.(ANTARA)

2. Disaster response still fragile in RI: Humanitarian report

Disaster reponse by the government and humanitarian workers is still below the United Nations' minimum standard, a report said.

The 2008 Indonesia Humanitarian Forum report said the poor responses happened amid a sharp decrease in the number of fatalities from disasters during 2008.

"We found that disaster response management in Indonesia does not yet fully comply with the minimum standards set by the UN, which is called the Sphere," Hening Parland, the Indonesia Humanitarian Forum executive director, said Thursday.

The forum conducted a study — based on media analysis from Jan. 1 to Dec. 31, 2008 — and found that the government and humanitarian institutions only applied some of the Sphere standards.

The Sphere Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response was first launched in 1997 by humanitarian NGOs, the Red Cross and the Red Crescent movement.

Sphere is based on two core beliefs: first, all possible steps should be taken to alleviate human suffering arising from a disaster; second, those affected by a disaster have a right to live with dignity and a right to assistance.

"The lowest scores [for the Indonesian government and aid workers] were on evaluation, competency and humanitarian workers' responsibility. Many of the workers are not even covered under an insurance scheme," Hening said.

"Many humanitarian workers are not aware of their vulnerability to the disasters while working in the field."

Hening said the activists' poor competency on disaster management would also hamper the sustainability of humanitarian programs.

The study showed that many of the disaster responses were still regarded simply as a "relief initiative" rather than as a comprehensive implementation of rights, as stipulated in Act 2007 on disaster management which mandated security and protection as basic human rights.

Indonesia is prone to natural disasters — ranging from earthquakes, volcanic eruptions and tsunamis — due to its location on the “Ring of Fire” volcanic belt.

Poor environmental management in most of the country’s 33 provinces, coupled with the impact of climate change, has made Indonesia more prone to floods and landslides.

Data from the Indonesian Humanitarian Forum showed there were 236 cases of disasters last year, with floods at 130 cases, followed by tropical storms (43 cases) and landslides (35 cases).

The Health Ministry said that a total of 7,618 people were killed during 2006 in 162 natural disasters nationwide. It also said that the number of disasters increased to 205 recorded events in 2007, killing 766 people.

The number of disasters increased last year with 408 cases. However, the number of fatalities decreased to 321 people.

“The decline in the death rate is due to the presence and the application of early warning systems, including those for floods and landslides. However, coordination among government offices and agencies to deal with the disasters remains poor,” Hening said.

The forum also criticized the effectiveness of regulations issued by the government and regional administrations regarding natural disaster mitigation.

“We have found there are 57 regulations related to disaster mitigation management. The effectiveness of these rules remains unclear,” Hening said.

The Humanitarian Forum, which consists of eight NGOs, including Muhammadiyah Disaster Management and Wahana Visi Indonesia, also plans to educate 1,000 humanitarian workers this year to help carry out missions in the field. (The Jakarta Post)

III. ARTIKEL :

1. Opportunity not to be missed by Obama (by Obama Anak Agung Banyu Perwita and Bantarto Bando)

The newly inaugurated administration in Washington provides an opportunity for the US to “reorganize, rearrange and reorient” its place and role in global politics at a time when its international image has been badly tarnished by the way the Bush administration handled international affairs.

Obama needs not only to start the hard work to restore the US standing and enable the country to meet the new challenges of the 21st century, but also to seize the opportunities that await the country. Such an opportunity was clearly reflected in the great enthusiasm of the members of the international community for Obama’s new perspective on the world’s pressing problems.

We do not mean to underestimate the difficulties Obama and his team might encounter when they execute their policies. The situation in the Middle East, for example, is volatile, complex and dangerous.

But the administration has made it clear that danger and difficulty will not cause the US to turn away. They also recognize and have said that peace and stability in the Middle East are in the national interest of the US as well as other countries in the region.

Indeed, it is a vital US national interest to create a more durable peace and stability in the Middle East and other corners of the world.

Observing that there are challenging times ahead for the US, meeting these challenges will need tools and solutions. It is against such a background that Obama introduced his vision of “smart power” that is, using strong diplomacy, in conjunction with aggressive development efforts and a wise application of military capabilities.

The “four Ds” – diplomacy, development, defense and democracy – as one might call them will serve as the four legs of American foreign policy.

Thus, the next four years will see the US in a great adventure, particularly in dealing with pressing issues including the Iranian and North Korean nuclear programs, the Israeli-Palestinian conflict, as well as wars in Iraq and Afghanistan.

Obama is out to “marry” military power with diplomacy and development initiatives to maximize operative pressure and build the conditions for positive outcomes.

However, many other issues in other areas of the world such as in Asia, Latin America and Africa can also not be abandoned. Familiarity with Obama, developed during his campaign, seems to be breeding hope. But then again, he is starting from a low baseline, following eight years of an unpopular and uncooperative US president. Maintaining this enthusiasm will definitely be both a challenge and an opportunity given the complexities he and his team now face.

Because of Obama's popularity and the departure of president Bush, there is a window of opportunity to improve relations between the US and the rest of the world, particularly the Muslim world.

He even plans to deliver a major address in an Islamic capital as part of his global outreach, which would target the Muslim world. This is where the perspective on Indonesia enters the picture.

Although Indonesia is not a Muslim country, an effective and productive US approach to the Muslim world calls for a much wider and deeper interaction with Indonesia, a Muslim majority.

The Obama administration might have learned from the fact that Indonesia and the US have, in the past ten years or so, been unable to avoid irritants in their bilateral ties.

Maybe they do not understand each other well enough. Perhaps this can also be a major test for Obama's public diplomacy, to win the hearts of the Muslim world.

Now that Obama is highly praised by the public here and with the presidential and parliamentary elections coming up in Indonesia, there is certainly a window of opportunity for Obama's administration to improve US relations with Indonesia at a time when the latter seems to be constantly moving toward a "full-fledged democratic" country.

A new policy approach which focuses on democracy will further help Indonesia. This in a sense is a long-awaited opportunity not to be missed by the newly installed US president. (The Jakarta Post)

IV. LAIN-LAIN :

V. EDITORIAL :

1. Rudal dan Soal Timur-Barat

Penyebutan Blok Timur dan Barat relevan saat Perang Dingin seusai Perang Dunia II hingga robohnya Tembok Berlin di penghujung dekade 1980-an.

Namun, harus diakui, dalam perkembangan berikut sebutan itu masih punya makna substansial. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu isu yang terus menjadi duri dalam hubungan Amerika Serikat dan Rusia sebagai pewaris utama Uni Soviet adalah masalah keamanan. Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dimotori AS terus meluaskan keanggotaan ke wilayah Eropa Timur, yang sebelumnya menjadi wilayah pengaruh Uni Soviet.

Seiring dengan perluasan keanggotaan NATO, AS juga berencana menggelar sistem antirudal dan radar di Polandia serta Republik Ceko. Oleh Rusia, langkah ini dianggap mengubah keseimbangan dan merugikan keamanan nasionalnya. Setelah imbauan yang disampaikan oleh (waktu itu) Presiden Vladimir Putin tak digubris oleh NATO, Rusia pun lalu mengambil sikap keras.

Rusia, misalnya, akan menggelar kembali rudal nuklirnya dan mengarahkannya ke negara-negara Eropa. Rusia yang dalam beberapa tahun terakhir banyak mendapat rezeki minyak, juga membangun dan mengaktifkan kembali militernya. Misalnya saja, ada skuadron pengebom strategis Tu-160 Blackjack yang diaktifkan kembali. Lebih jauh dari itu, Rusia juga memperluas kerja sama militer, termasuk dengan negara Amerika Latin, seperti Venezuela.

AS yang dalam alasan penggelaran sistem antirudal menyebut ancaman negara-negara bengal (rogue state), dan menyatakan sistem tersebut tidak ditujukan terhadap Rusia, tampaknya jadi risau juga dengan langkah Rusia. Masuk akal juga karena bagaimanapun Rusia masih tetap kekuatan nuklir utama dunia, dan dengan perekonomian yang membaik, bukan tidak mungkin ia akan kembali menjadi adidaya dunia.

Untunglah, pemerintahan Presiden AS George W Bush yang banyak dicitrakan sebagai pemerintahan agresif kini telah digantikan oleh pemerintahan Barack Obama yang diharapkan bisa menciptakan suasana baru, dalam kaitan ini yang lebih kondusif bagi terciptanya dunia yang lebih damai. Diberitakan, AS telah menghentikan program pertahanan antirudal di Eropa.

Dalam konteks inilah kita juga memaknai keputusan Rusia menggelar rudal SS-26 di Kaliningrad. Perkembangan di atas melegakan karena kalau ketegangan di Eropa menyangkut penggelaran antirudal berlanjut, tidak urung dunia juga yang berikutnya akan ikut menanggung dampaknya. Padahal, dunia sedang dililit krisis ekonomi.

Apa jadinya kalau sumber daya yang semakin terbatas untuk tujuan kesejahteraan disedot untuk lomba senjata dan penguatan militer. Kita berharap, kuasa-kuasa utama dunia bisa terus melanjutkan langkah membuat dunia terbebas dari ketegangan yang tidak perlu. (Kompas)

Jakarta, 30 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu